

Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029

The Public Perception of The Political Ethics of Presidential and Vice-Presidential Candidates for The Period of 2024-2029

Amelia Haryanti

Universitas Pamulang

Email: dosen00811@unpam.ac.id

Riwayat Artikel

Diterima: 17 Oktober 2023

Direvisi: 22 Maret 2024

Disetujui: 29 April 2024

doi: 10.22212/jp.v15i1.4208

Abstract

This research aims to analyze the public perception of the political ethics of prospective national leaders in the context of general elections. The focus of this study is on efforts to understand how the public views and assesses the integrity and transparency of prospective leaders in conducting political campaigns and governing the country. This research employs a qualitative approach by conducting in-depth interviews with a number of respondents representing various segments of society. The collected data is analyzed using content analysis techniques to identify key themes related to the public perception of the political ethics of prospective leaders. The research findings indicate that the public considers the political ethics of prospective leaders to be a crucial aspect in shaping a leadership that is both integrity-driven and transparent. They emphasize the importance of integrity in adhering to moral principles and good political ethics, as well as transparency in disseminating information to the public regarding campaign funding and other significant decisions. Additionally, this research identifies factors that influence the public's perception of the political ethics of prospective leaders. The results of this study are expected to contribute to the understanding of the significance of political ethics in the process of selecting national leaders. Furthermore, these research findings are anticipated to provide insights for prospective leaders in building integrity-driven and transparent leadership, thereby addressing the hopes and trust of the public in steering the country toward progress and justice.

Keywords: Public Perception; Political Ethics; Prospective Leaders

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap etika politik calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024 mendatang. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dengan responden penelitian dari berbagai kalangan di Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghadapi pemilihan umum 2024, masyarakat menginginkan calon pemimpin yang berintegritas, jujur, adil, responsif, tidak mementingkan kepentingan kelompok tertentu, mampu membangun infrastruktur dan fasilitas umum lebih baik, bijaksana dalam mengambil keputusan, memiliki komitmen dalam menjalankan amanat rakyat, menjalankan demokrasi, menghindari kampanye negatif selama musim kampanye, menjaga keharmonisan di atas perbedaan latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam, menjaga persatuan dan kedamaian, mengutamakan kepentingan masyarakat, mau mendengar dan memenuhi aspirasi masyarakat. Calon pemimpin negeri juga dihadapkan pada beberapa hambatan selama pelaksanaan proses pemilihan berupa polarisasi politik, politik uang, penyebaran berita palsu, kompetisi dan persaingan, akses media, tekanan kelompok kepentingan, regulasi hukum, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada

sejumlah responden yang mewakili berbagai lapisan masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait persepsi masyarakat terhadap etika politik calon pemimpin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang pentingnya etika politik untuk calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat; Etika Politik; Calon Pemimpin

Pendahuluan

Tahun 2024 Indonesia kembali melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) presiden dan legislatif. Pemilu ini banyak dinantikan oleh masyarakat Indonesia, mengingat pesta demokrasi ini yang hanya berlangsung setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu tahun 2024 merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang memiliki etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Persepsi masyarakat menjadi cerminan dari harapan untuk memiliki pemimpin yang dapat memimpin dengan kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran atas kepentingan publik. Dengan demikian, pemilu tahun 2024 tidak hanya menjadi ajang pesta demokrasi semata, tetapi juga momen kritis untuk membangun kepemimpinan yang berintegritas dan transparan untuk masa depan bangsa.

Masyarakat begitu menantikan, siapakah pemimpin yang layak untuk memimpin mereka, sebab banyak calon yang diusung oleh partai politik dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Pemilihan umum tahun 2024 di negeri ini menjadi momen krusial bagi masa depan negara dan rakyatnya. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita berperan penting dalam menentukan pemimpin-pemimpin yang akan memegang kendali negeri untuk beberapa tahun ke depan.

Menjadi pemimpin di Indonesia dengan berbagai pandangan dan latar belakang yang berbeda, menjadi tantangan tersendiri bagi calon pemimpin negeri, sehingga calon pemimpin ini harus memiliki etika yang baik

agar mampu merebut hati rakyat Indonesia, sehingga keinginan untuk menjadi penguasa di Indonesia berjalan mulus. Para ahli mencatat bahwa dorongan paling kuat adalah keinginan untuk memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa persaingan dalam hal ini selalu ramai dan diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, pengalaman berada di pusat perhatian kekuasaan seringkali membuat para pelaku tidak puas hanya dengan satu periode pemerintahan. Mereka pasti akan berupaya untuk memperpanjang masa jabatan hingga batas waktu maksimal, jika peraturan tidak membatasinya. Secara sistematis, kenyataan ini meningkatkan intensitas politik dan menjadikannya tidak terkendali. Akibatnya, konflik terjadi di berbagai tempat, bahkan tidak jarang terlibat dalam tindakan tidak etis demi mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.¹

Sebuah pemerintahan dapat berjalan secara efisien ketika dikelola oleh pemimpin yang dapat dipercaya, baik di tingkat daerah maupun pusat. Di Indonesia, pemimpin dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum dengan harapan bahwa pemilu akan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi rakyat, yang lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok atau diri sendiri. Secara ideal, pemimpin yang terpilih seharusnya memiliki kualifikasi yang baik dalam hal keilmuan dan

1 M Anzaikhan and Fitri Idani, "Kepemimpinan Ideal Umar Bin Abdul Aziz Dan Relevansinya Terhadap Konsep Pemerintahan Modern.(Studi Analisis Pemikiran Fahrudin Faiz)," *POLITICA:Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol IX, no. II (2022): 127, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4878>.

pengalaman kepemimpinan. Namun, realitas seringkali berbeda. Calon yang dapat meraih dukungan suara terbanyak dan memenuhi ambang batas minimal perolehan suara akan mendapatkan kursi di pemerintahan.²

Pemilu tahun 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Masyarakat memiliki harapan besar terhadap calon pemimpin yang akan memimpin negara ke depan. Di tengah tantangan dan kompleksitas dinamika politik modern, masyarakat mengharapkan calon pemimpin tidak hanya memiliki visi dan kompetensi, tetapi juga etika politik yang kuat. Etika politik merupakan fondasi moral yang mengarahkan perilaku dan tindakan seorang pemimpin dalam konteks politik. Persepsi masyarakat terhadap etika politik calon pemimpin dalam pemilu tahun 2024 merupakan salah satu aspek yang sangat menarik untuk diungkap. Dalam menghadapi pemilu, masyarakat memiliki peran kunci sebagai penentu masa depan negara. Sebelum seseorang terpilih sebagai pemimpin, mereka biasanya menetapkan suatu kesepakatan sosial di depan masyarakat. Namun, jika setelah terpilih sebagai pemimpin mereka tidak mematuhi atau menghormati kesepakatan sosial tersebut, hal itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan dan tindakan yang tidak adil terhadap kepercayaan yang telah diberikan.³

Di tengah dinamika politik dan beragam isu yang dihadapi, persepsi masyarakat terhadap etika politik calon pemimpin menjadi pusat perhatian dan refleksi atas harapan dan tuntutan untuk membentuk kepemimpinan yang berintegritas dan transparan. Pada saat-saat penting seperti pemilu, masyarakat menjadi saksi dari berbagai tindakan dan

pernyataan calon pemimpin yang menjadi sorotan publik. Paparan media massa dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin. Isu-isu etika politik, seperti transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan kampanye dan tugas kepemimpinan, menjadi perhatian utama bagi masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan akses informasi yang semakin luas, masyarakat memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi dan membandingkan profil calon pemimpin dengan lebih mudah. Reputasi dan sejarah calon pemimpin dalam politik sebelumnya juga menjadi faktor penentu dalam menilai etika politik mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam debat politik, diskusi, dan kampanye pemilu juga memberikan pengaruh besar terhadap persepsi mereka terhadap etika politik calon pemimpin. Masyarakat yang terlibat langsung dalam proses politik cenderung lebih peka terhadap isu-isu etika politik yang muncul.

Etika politik calon pemimpin negeri dalam pemilu 2024 sangat penting karena berperan dalam membentuk karakter dan kualitas kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat. Etika politik calon pemimpin di tahun 2024 menjadi hal yang krusial bagi masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum. Masyarakat mengharapkan calon pemimpin yang berpegang pada etika politik yang baik, yang mencerminkan integritas, moralitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Masyarakat menginginkan calon pemimpin yang konsisten dengan apa yang mereka katakan dan lakukan. Calon pemimpin harus memiliki integritas tinggi dan tidak mengubah prinsip-prinsipnya hanya untuk kepentingan politik atau pribadi. Selain itu, Masyarakat mengharapkan calon pemimpin yang transparan dalam menyampaikan informasi

2 Muh In'amuzzahidin, "Etika Politik Dalam Islam," *Jurnal Wahana Akademika* Vol 2, no. 2 (2015): 90, <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382> PDF.

3 Ahmad Bashori and Zainun Kamaluddin Fakhri, "Etika Politik Perspektif Bahtiar Effendy," *Paradigma Jurnal Kalam Dan Filsafat* Vol 3, no. 02 (2021): 66, <https://doi.org/10.15408/paradigma.v3i02.30898>.

kepada publik, terutama terkait dengan aspek-aspek penting lainnya. Akuntabilitas terhadap keputusan dan tindakan juga dianggap penting untuk memastikan calon pemimpin bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan oleh rakyat.

Etika politik calon pemimpin harus mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi, termasuk menghormati hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik masyarakat. Calon pemimpin harus berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap langkah kampanye dan selama masa pemerintahan. Masyarakat juga mengharapkan calon pemimpin yang jauh dari praktek-praktek korupsi dan nepotisme, sehingga dengan etika politik yang baik akan mencegah calon pemimpin untuk memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam proses ini, etika politik calon pemimpin menjadi sorotan utama untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas, jujur, dan mampu bertanggung jawab atas kepentingan rakyat. Etika politik merupakan landasan moral yang mengatur perilaku dan tindakan para calon pemimpin dalam berkompetisi dalam pemilihan umum. Tahun 2024 menawarkan kesempatan bagi calon pemimpin negeri untuk menunjukkan komitmen calon pemimpin terhadap integritas dan transparansi dalam berpolitik. Dalam era di mana informasi mudah diakses oleh publik, calon pemimpin perlu berada dalam posisi terbuka dan akuntabel dalam seluruh langkah kampanye politik mereka, calon pemimpin harus menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Calon pemimpin harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan memastikan kebijakan dan keputusan yang diambil akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini untuk mengetahui:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap etika politik calon pemimpin dalam pemilu tahun 2024?
2. Apa saja nilai etika politik yang diharapkan oleh masyarakat dari calon pemimpin di tahun 2024?
3. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh calon pemimpin dalam menjalankan etika politik dalam proses pemilu 2024?

Kerangka Teori

Etika Politik

Sebagai unsur inti dalam pemerintahan, politik telah berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi mendukung kepentingan bersama yang seharusnya menjadi fokus utama. Sebaliknya, kepentingan bersama tersebut kini lebih dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kekuasaan, yang pada gilirannya merusak kemampuan masyarakat untuk mencapai mobilitas sosial dan hak asasi manusia. Penyalahgunaan kekuasaan yang terus berlangsung adalah bukti dari perubahan wajah demokrasi di Indonesia. Reformasi seharusnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama, menjunjung tinggi keadilan, dan meningkatkan kualitas hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ternyata dalam kenyataannya harapan tersebut belum sesuai.⁴ Politik sebenarnya menjadi alat untuk mengatur tatanan hidup bersama dalam suatu negara, yaitu bagaimana suatu sistem pemerintahan dapat mengatur kebijakan suatu tindakan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Politik juga mengedepankan pengetahuan dalam menghadapi suatu permasalahan dalam negara. Politik yang terbentuk dalam organisasi memiliki tujuan

⁴ Darsono Darsono and Clara Aprillia, "Patologi Pembangunan Etika Politik.Pascareformasi Dalam Perspektif Poststrukturalis-Hipersemiotik," *Journal of Urban Sociologi* Vol 3, no. 1 (2020): 75, <https://doi.org/10.30742/jus.v3i1.1193>.

tertentu yang sesuai dengan ideologi bangsa. Dalam hal ini dalam tatanan sistem negara Indonesia adalah menurut ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sudah mencakup kehidupan bangsa Indonesia dilihat dari berbagai sisi, baik dari latar belakang bangsa dan sikap yang harus diterapkan dalam hidup bersama.⁵

Politik memiliki peran amat besar dalam suatu kelompok. Politik membahas mengenai kekuasaan. Politik mengandaikan cara manusia untuk hidup. Apabila cara hidup manusia disatukan dengan nilai etika yang ada, maka betapa idealnya kehidupan bersama dalam suatu kelompok/negara tersebut. Pemimpin yang berbicara mengenai kebijakan, berbicara soal hukum, berbicara soal tatanan negara/maupun kelompok dengan didasarkan etika maka dapat dipastikan ada keseimbangan dalam kehidupan manusia. Meskipun memiliki keragaman dan perbedaan tetapi dengan keseimbangan semua akan berjalan dan menuju kepada kebaikan hidup.

Menurut Frans Magnis Suseno, "Etika politik mengacu pada sekumpulan nilai moral yang bertujuan mengatur atau memimpin suatu hal dengan tujuan mendatangkan manfaat. Ini mencerminkan filsafat moral terkait dimensi politis dalam kehidupan manusia".⁶ Berbicara mengenai etika politik, tentunya kedua hal tersebut memiliki peran masing-masing. Etika yang memiliki arti bagaimana seseorang harus bertindak sesuai dengan etiket yang baik. Sedangkan politik lebih mengatur bagaimana manusia dapat hidup. Jika manusia dalam hidup bersama hanya berpegang pada politik saja maka tindak kejahatan akan terjadi, keserakahan, egois diri, hawa nafsu hal ini adalah tindakan yang tidak manusiawi karena tidak memikirkan manusia lain yang hidup

bersamanya. Ini tentu saja bertentangan dengan sifat alami manusia sebagai makhluk yang berinteraksi dengan lingkungannya. Tetapi apabila manusia memiliki etika dalam hidup bersama. Maka keindahan dalam pola hidup bersama akan terwujud, yaitu perdamaian, saling membantu, memiliki jiwa gotong royong, tercipta toleransi.

Dari perspektif etika politik, manusia pada dasarnya memiliki dimensi politik yang dapat dipelajari melalui tiga sudut pandang, yaitu sebagai kelompok sosial, dalam konteks sosialnya, dan dalam kehidupan politisnya. Manusia, sebagai bagian dari masyarakat, menunjukkan adanya kesesuaian di mana ia memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai keinginannya, namun hal ini menjadi bermakna ketika berinteraksi dengan manusia lainnya. Ini berarti bahwa keberadaan manusia tercermin karena adanya orang lain, dan keberlangsungan hidup dan perkembangannya juga tergantung pada keberadaan orang lain. Dimensi sosial manusia diartikan sebagai proses di mana seorang individu menemukan identitasnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, dimensi politis dalam kehidupan manusia mengacu pada peran yang mengatur kerangka kehidupan masyarakat baik secara normatif maupun efektif.⁷

Menurut Haryatmoko: Pada dasarnya, negara dan politik adalah bagian tak terpisahkan. Politik praktis adalah arena pertarungan kekuatan, sementara prinsip-prinsip politik sering kali dianggap sebagai konsep ideal yang tidak selalu merefleksikan realitas keras dunia politik.⁸ Etika politik sangat penting dalam segala kondisi, baik itu dalam kondisi normal, teratur, terkendali, atau bahkan saat kondisi kacau. Terutama saat situasi sedang kacau, kehadiran etika politik menjadi sangat berarti karena dapat membantu

5 Fransiska Irma Juanita, "Hubungan Etika Politik Dan Relevansinya Bagi Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Indonesia," OSFPREPRINTS, June 2019, 1, <https://doi.org/10.31219/osf.io/u4nfp>.

6 Frans Magnis Suseno, *Etika Politik :Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, VII (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), 8.

7 Rowland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Etika Politik* (Jakarta. Kompas, 2013).

8 Haryatmoko Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, 3rd ed. (Jakarta: : PT. Kompas Media Nusantara, 2014).

dalam membentuk mekanisme komunikasi yang efektif dengan pihak berwenang. Dengan kata lain, meskipun politik dapat terasa kasar atau kurang santun, setiap tindakan tetap memerlukan legitimasi yang terkait dengan norma etika, prinsip-prinsip moral, hukum, dan aturan.

Etika mempertimbangkan konsep baik dan buruk, bukan sekadar benar dan salah terkait sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam interaksi mereka dengan sesama, baik di masyarakat maupun dalam organisasi publik atau bisnis. Karena itu, etika memainkan berperan penting dalam kehidupan benegara. Etika digunakan sebagai panduan, referensi, dan pedoman tentang tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan politik, serta sebagai kriteria untuk menilai apakah perilaku administrasi negara dalam melaksanakan kebijakan politik layak atau tidak. Ini karena administrasi negara tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan politik semata, tetapi juga melibatkan isu-isu yang menyangkut kehidupan manusia.⁹

Menurut pandangan Franz Magnis Suseno, etika merupakan ilmu dan bukan sekadar ajaran; ia memberikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, yang dikenal sebagai moralitas. Sebaliknya, bahwa etika tidak hanya menerima norma atau ajaran moral secara mentah-mentah, tetapi juga mengajukan pertanyaan kritis tentang kebenaran dan relevansi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika dianggap sebagai ajaran moral, karena meskipun memiliki kekurangan karena tidak berwenang menentukan perilaku apa saja yang sebaiknya dilakukan dan mana yang harus dihindari, namun pada saat yang sama, etika juga memiliki nilai lebih karena berusaha untuk memahami mengapa atau berdasarkan apa kita harus hidup sesuai dengan norma-norma

tertentu.¹⁰

Dalam masyarakat, peran etika politik dibatasi pada instrumen teoritis untuk menelaah dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Ini dilakukan tidak berdasarkan emosi, prasangka, atau pemikiran sebelumnya, melainkan secara rasional, obyektif, dan argumentatif.¹¹ Manfaat dari etika politik tidak dapat dilihat secara langsung dalam konteks praktis. Etika politik tidak berfungsi sebagai alat untuk memberikan ceramah kepada para politisi atau secara langsung menggugat legitimasi moral dari berbagai keputusan yang mereka buat. Namun, etika politik menekankan bahwa segala tindakan untuk mengatur masyarakat haruslah bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dasar. Meskipun tidak memberikan solusi praktis secara langsung, etika politik dapat memberikan panduan dan pedoman moral bagi mereka yang ingin mengevaluasi struktur dan kehidupan politik dengan mempertimbangkan martabat manusia sebagai standar utama.¹²

Etika politik tidak hanya berfokus pada tingkah laku para politisi, melainkan juga mencakup praktik institusi sosial, hukum, komunitas, serta struktur sosial, politik, dan ekonomi. Karena perilaku politisi hanyalah satu aspek dari etika politik. Suatu niat yang baik harus didukung oleh institusi yang adil. Niat baik berperan dalam memperjelas konsep tanggung jawab, sementara institusi (seperti hukum, peraturan, kebiasaan, dan lembaga sosial) bertugas mengatur pelaksanaan tanggung jawab tersebut.¹³ Etika politik melibatkan dua aspek utama, yakni individu dan sosial. Dari satu sisi, etika politik mempertimbangkan moralitas individu dan

10 Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Cet Ke-17 (Yogyakarta : kanasius, 2005), 14.

11 In'amuzzahidin, "Etika Politik Dalam Islam," 92.

12 useno, *Etika Politik :Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 2.

13 Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, 25.

9 Setiawan and Fauzi, "Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia," 8.

aspek sosial secara bersamaan. Etika individu membahas moralitas individu, sementara etika sosial mencerminkan hukum, struktur sosial, dan keadilan institusional. Di sisi lain, etika politik juga mencakup etika institusional dan etika keutamaan secara bersamaan. Institusi dan keutamaan adalah dua dimensi etika yang saling mendukung, di mana institusi mengatur struktur sosial sementara keutamaan mengarah pada nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Keutamaan merupakan faktor internal yang menjaga stabilitas tindakan individu, sedangkan institusi bertanggung jawab atas stabilitas eksternal yang melingkupi individu.¹⁴

Menurut Ramlan Surbakti, politik merupakan dinamika interaksi antara pemerintah dan warga masyarakat, yang melibatkan proses pembuatan dan implementasi keputusan yang berdampak pada kesejahteraan bersama masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu.¹⁵ Menurut F. Isjwara, politik merupakan upaya untuk memperoleh atau menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk menjalankan kekuasaan.¹⁶ Dengan demikian, dapat diungkapkan bahwa untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, dilakukan melalui jalur politik.¹⁷

Kepemimpinan Politik

Pemimpin harus memiliki kewibawaan dan memiliki orang-orang di sekeliling yang mampu dan setia. Tetapi Machiavelli berpendapat bahwa untuk mencapai suatu tujuan, seorang pemimpin harus dapat mengendalikan kekuasaannya dari segala aspek (sistem pemerintahan sentral). Pemimpin harus memiliki kepandaian tetapi juga harus kejam

yang dapat menjadi kekuatan dan menjaga kekuasaannya. Menurutnya seorang pemimpin dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Machiavelli berpendapat bahwa “sistem suatu negara harus kuat dan sehat. Maka, negara harus memiliki sistem militer yang tangguh untuk mempertahankan keutuhan negara. Kepemimpinan sebagai aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan”.¹⁸

Pengelompokan kepemimpinan bisa dibagi berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (1) cara kepemimpinan dan sifat pemimpin; (2) hasil yang dicapai dari kepemimpinan; dan (3) asal-usul kekuasaan. Cara kepemimpinan sama pentingnya saat membicarakan kepemimpinan demokratis.¹⁹ Menurut Lord, kekuasaan harus dibagikan dengan orang lain dan digunakan dengan menghormati harga diri individu. Berjalannya demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemilihan pemimpin, tetapi juga oleh sifat demokratis dari para pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini, penting bagi pemimpin untuk mendukung dan memperkuat nilai-nilai dan institusi demokrasi, termasuk kemampuan untuk mengendalikan penggunaan kekuasaan. Demokrasi bukanlah tentang pemerintahan oleh sekelompok elit, melainkan tentang pemerintahan oleh beberapa pemimpin yang memenuhi kriteria demokratis.²⁰

Mintzberg menjelaskan bahwa peran seorang pemimpin dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambil keputusan. Peran interpersonal melibatkan tiga jenis peran, yakni figurehead, leader, dan komunikator. Figurehead bertindak sebagai perwakilan resmi organisasi, sementara leader memberi motivasi kepada bawahan melalui

14 Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, 25.

15 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Grasindo, 2010), 1.

16 F. Isjwara F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cet 9 (Bandung : Putra Bardin, 1999), 42.

17 Rashda Diana, Siswanto Masruri, and Surwandono Surwandono, “Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi,” *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol 14, no. 2 (2018): 367, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433>.

18 Bass Bernard, M, *Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications*, 3rd ed (New York: The Free Press, 2008), 1.

19 Sondang P. Siagian, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*, Cet 4 (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), 4.

20 Robert G Lord and Karen J Maher, *Leadership and Information Processing Linking Perceptions and Performance* (Unwin-Hyman, Boston, 1993), 16.

komunikasi yang efektif, dan komunikator berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi kerjasama antarpihak. Peran informasional fokus pada kemampuan seorang pemimpin dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi sebagai pemantau, pengedaran informasi, dan juru bicara. Terakhir, peran pengambil keputusan melibatkan kemampuan pemimpin dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk membuat keputusan yang tepat.²¹

Kepemimpinan politik berperan dalam menentukan interaksi antara berbagai kelompok kepentingan. Interaksi antara pemangku kepentingan dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dipengaruhi oleh sejauh mana sinergi antara mereka terjalin. Sinergi ini perlu dibangun melalui kepemimpinan politik yang efektif dari seorang pemimpin. Dengan sinergi yang kuat, aktor-aktor kepentingan akan lebih bersedia untuk berpartisipasi secara aktif.²²

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Politik Calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 adalah penelitian kualitatif, dengan metodologi yang digunakan adalah studi deskriptif analisis.²³ Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual, serta menggali makna dan pandangan yang ada di balik persepsi masyarakat terhadap etika politik calon pemimpin. Dalam penelitian kualitatif, fokus utama adalah pada

pengumpulan data yang berupa kata-kata, ungkapan, narasi, atau teks, seperti proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang mendalam, forum grup diskusi (FGD), atau penelitian dokumen. Wawancara dilakukan selama 3 bulan dimulai dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 dengan melibatkan 24 responden yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dari mulai pemilih pemula, ibu rumah tangga, guru, dosen, praktisi, mahasiswa, pekerja, wirausaha, driver ojek online, dan satpam. Pemilihan responden ini dilakukan secara acak sesuai dengan seringnya interaksi penulis dengan responden. Wawancara dengan kalangan akademisi dan praktisi peneliti lakukan di waktu luang penulis mengajar, sedangkan wawancara responden lainnya peneliti lakukan di masyarakat sekitar tempat tinggal penulis di sekitar Kota Tangerang Selatan

Data dikumpulkan melalui penelitian dokumen dengan mengidentifikasi gagasan atau konten yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, situs web, dan informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

Pengumpulan data dengan melibatkan sejumlah responden dengan menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap etika politik calon pemimpin dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas dan transparan. Setelah wawancara dan pengambilan data dilakukan, peneliti menganalisis data yang berasal dari teks, seperti artikel berita, wawancara, atau pernyataan publik terkait dengan etika politik calon pemimpin

21 Henry. Mintzberg, "Leadership and Management Development: An Afterword," *The Academy of Management Executive* Vol 18, no. 3 (2004): 140, <https://doi.org/10.5465/AME.2004.14776190>.

22 Akbar Pandu Dwinugraha, "Kepemimpinan Politik Kepala Desa," *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol 5, no. 2 (2020): 178, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v5i2.4834>.

23 Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori Dan Panduan Praktik Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula*. (STIA-LAN Press : Jakarta, 2000), 4.

Etika Politik Calon Pemimpin Negeri Tahun 2024

Etika politik adalah bidang filsafat moral yang mempertimbangkan aspek-aspek etis dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan politik, atau subdisiplin filsafat yang membahas prinsip-prinsip etika dalam konteks politik. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap etika politik calon pemimpin di tahun 2024.²⁴ Masyarakat menginginkan calon pemimpin yang dapat menjadi teladan dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi dalam dunia politik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden.

Peneliti: Mengingat Tanggal 14 bulan Februari 2024, akan dilaksanakan pemilihan umum serentak untuk pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemimpin seperti apa yang bapak harapkan jika mereka terpilih nanti?

AJ: Kami sebagai rakyat kecil, tetap menginginkan harga-harga yang terjangkau, BBM tidak naik, BPJS tidak naik, mau sekolah negeri maupun swasta digratiskan, biar anak kami bisa tetap sekolah, penghasilan kami tidak menentu, jadi intinya harga-harga terjangkau.²⁵

AN: Pemimpin yang akan datang mudah-mudahan bisa membawa aspirasi masyarakat, mempertahankan demokrasi, tidak korupsi, mengutamakan kepentingan umum.²⁶

RS: Siapapun pemimpinnya, harapan kami bisa membawa ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, program kerja yang baik tetap dilaksanakan, bahkan lebih ditingkatkan, berintegritas, dan lebih mementingkan kepentingan rakyat.²⁷

24 Suseno, Etika Politik :Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, 1.

25 Wawancara dengan Ade Juliansyah, (Driver Ojek Online), 28 Juli 2023

26 Wawancara dengan Ade Juliansyah, (Driver Ojek Online), 28 Juli 2023

27 Wawancara dengan Reni Suryani, S.H., M.H (dosen F.H. Unpam), 3 Agustus 2023

RR : Sudah pasti, kami menginginkan keamanan, harga kebutuhan sehari-hari terjangkau.²⁸

TA : Saya melihat yang sudah sudah, mudah-mudahan pemilihan umum ini juga berjalan dengan damai, saya menginginkan pemimpin yang adil dan jujur, dan tidak korupsi.²⁹

BS: Pemimpin yang diharapkan di masa yang akan datang, harus mampu menjalankan visi dan misinya, karena saya yakin visi misi itulah yang terbaik, maka setelah terpilih harus mampu memenuhi janji politiknya, dan legowo ketika kalah.³⁰

CD : Walaupun saya kurang mengikuti perkembangan politik, namun yang saya harapkan pemimpin yang akan datang bisa mewakili aspirasi kita rakyat kecil, harga terjangkau itu yang utama, biaya pendidikan dan kesehatan juga terjangkau oleh kami.³¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa, masyarakat menginginkan calon pemimpin di tahun 2024 yang berintegritas, tidak terlibat korupsi, mampu mempertahankan demokrasi, mementingkan kepentingan umum, mampu mempertahankan harga-bahan pokok termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, mampu menjalankan dan mewujudkan visi dan misinya ketika terpilih nanti, dan tidak kampanye negatif. Impian rakyat Indonesia adalah mempunyai pemimpin serta pemerintah yang benar-benar memikirkan negaranya dan nasib rakyatnya ke depan. Yang bisa merubah negaranya menjadi maju, sejahtera, makmur, dan adil. Dan yang diinginkan oleh rakyat adalah pemimpin yang merakyat yang tahu keluhan rakyat dan apa yang diinginkan rakyat untuk

28 Wawancara dengan Ibu Restu Refina, (ibu Rumah Tangga), 3 Agustus 2023

29 Wawancara dengan Tiara Avivah, (mahasiswa dan pemilih pemula), 9 Agustus 2023

30 Wawancara dengan Dr. Bambang Santoso (Praktisi), 6 September 2023

31 Wawancara dengan Cecep Durahman, (Satpam), 14 Agustus 2023

kesejahteraannya.

Dalam perspektif normatif, kesuksesan kepemimpinan sangat bergantung pada tiga elemen kunci, yang mencakup persyaratan, karakteristik, sifat, gaya, prinsip, teknik, pedoman, dan jenis kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan. Kepemimpinan akan efektif, dihormati, dan mendapatkan pengakuan tinggi jika pemimpin memenuhi tiga kualifikasi utama. Pertama, pemimpin harus memiliki kompetensi dalam hal rasionalitas dan kecerdasan (pengetahuan tentang tujuan organisasi, prinsip-prinsip organisasi, kemampuan mengelola organisasi dengan efisiensi, dan pencapaian tujuan organisasi secara maksimal). Kedua, pemimpin harus memiliki integritas moral (tinggi dalam etika, moralitas, dan karakter yang tulus). Ketiga, pemimpin harus menjaga kesehatan fisik (badan yang sehat) dan memberikan contoh dalam bentuk prestasi yang dibanggakan.³²

Seorang pemimpin juga harus memegang prinsip kejujuran, baik tutur katanya, dan berbicara hanya tentang hal-hal yang memiliki nilai penting. Pasalnya, kebenaran akan terungkap seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, sebelum mengungkapkan suatu informasi, pemimpin harus mempertimbangkan dengan matang, karena ia akan selalu bertanggung jawab atas ucapannya.³³

Nilai Etika Politik Diharapkan Oleh Masyarakat Dari Calon Pemimpin Di Tahun 2024

Nilai etika politik yang diharapkan oleh masyarakat dari calon pemimpin di tahun 2024 merupakan pandangan yang mengemuka dari hati nurani dan keinginan untuk memiliki pemimpin yang melayani dengan integritas dan dedikasi. Sebagai cerminan dari keinginan untuk membangun kepemimpinan yang berintegritas dan transparan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan responden:

Peneliti : Bagaimana dengan etika politik dari pemimpin yang diharapkan di tahun 2024, misalkan kampanye yang dilakukan, atau dari visi dan misi yang nantinya akan disampaikan.

BS: Jika berbicara masalah etika politik, seorang pemimpin harus memiliki integritas, maka bisa dimulai dari perilaku sehari-hari yang seringkali di ekspos di berbagai media, baik media masa maupun media sosial, masyarakat akan menilai dari masing-masing pasangan calon, bagaimana kesehariannya, cara memperlakukan masyarakat, pendukungnya, maupun bukan pendukungnya, mau menerima kritikan dan saran dari masyarakat, apalagi dengan adanya media sosial, mereka bisa menerima kritikan atau dukungan langsung dari masyarakat, dari sinilah masyarakat bisa menilai, layak atau tidak nantinya mereka memimpin.

Untuk masa kampanye pun demikian, tidak mengumbar janji atau mengumbar program yang tidak bisa dipenuhi, demi untuk mendapatkan suara sebanyak banyaknya. Masyarakat sekarang semakin cerdas, mereka akan menagih janji yang disampaikan ketika masa kampanye, sebab rekam jejak digital bisa diputar kembali untuk menagih janji kampanye.³⁴

RS: Masa kampanye harus digunakan seefektif mungkin oleh pasangan

³⁴ Wawancara dengan Dr. Bambang Santoso (Praktisi), 6 September 2023

32 Lany Erinda Ramdhani, "Fenomena Kepemimpinan Fenomenal," *Jurnal Borneo Administrator* Vol 11, no. 3 (2015): 271, <https://doi.org/10.24258/jba.v11i3.203>.

33 Fuad Muhammad Zein, "Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Al Mawardi)" Vol 1, no. 2 (2016): 504, <https://doi.org/10.25217/jm.v1i2.52>.

calon, karena ini kunci keberhasilan mereka dalam meraup suara masyarakat, tidak mengumbar janji diluar nalar dan logika, tidak menjelek-jelekan calon pasangan lain, intinya mereka kampanye yang baik baik saja, sesuai dengan visi dan misinya, ajak masyarakat untuk mensukseskan pemilihan umum nanti. Termasuk juga dalam membuat kebijakan, tidak menyalahgunakan kekuasaannya, dan memastikan keputusan yang dibuat sesuai dengan kepentingan masyarakat.³⁵

NS : Saya berharap, pemimpin yang akan datang seperti pemimpin sebelumnya, yang menjaga keharmonisan dan kebhinekaan, mendamaikan pihak pihak yang berkonflik, merangkul masyarakat yang selama ini terpecah pecah karena berbeda dukungan, karena setelah terpilih mereka bukan presiden partai atau presiden pendukungnya, namun presiden rakyat Indonesia. Masyarakat juga diberikan kesempatan yang sama dalam pemilu ini.³⁶

YS: Mudah mudahan janji yang disampaikan selama masa kampanye bisa dilaksanakan, terutama nasib guru guru yang belum mendapatkan tunjangan pemerintah diperhatikan. Ini aspirasi kami, keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus lebih diperhatikan.³⁷

Dari kesimpulan hasil wawancara peneliti dengan responden, masyarakat menginginkan calon pemimpin yang memiliki etika yang baik, integritas dan kejujuran karena dengan nilai etika ini, merupakan fondasi dari kepercayaan yang dibangun oleh calon pemimpin dengan masyarakat. Tanpa integritas dan kejujuran, sulit bagi masyarakat untuk mempercayai dan mendukung calon pemimpin dalam memimpin negara. Di tahun 2024 masyarakat menginginkan calon pemimpin

yang dapat membangun kepercayaan yang kuat dari masyarakat, selain itu dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, calon pemimpin diharapkan mampu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik.

Masyarakat mengharapkan calon pemimpin untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan memberi ruang bagi berbagai suara dan perspektif dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok dan memberikan ruang bagi suara-suara yang berbeda, calon pemimpin dapat lebih memahami masalah yang dihadapi masyarakat dan mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat. Partisipasi mereka akan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh calon pemimpin mencerminkan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Ini akan memperkuat representasi dan legitimasi dari pemerintahan yang dipimpin oleh calon pemimpin.

Calon pemimpin yang mengedepankan keharmonisan dan menghargai kebinekaan akan berusaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka akan mendorong masyarakat untuk bersatu dan bekerja bersama demi kepentingan bersama. Keharmonisan dan menghargai kebinekaan membantu mengurangi potensi konflik yang bisa timbul akibat perbedaan budaya, agama, dan identitas lainnya. Calon pemimpin yang mampu merangkul keberagaman akan menciptakan lingkungan yang aman dari konflik sosial. Calon pemimpin yang mengedepankan keharmonisan dan menghargai kebinekaan akan berusaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Calon pemimpin seperti ini yang akan mampu merangkul keberagaman akan menciptakan lingkungan yang aman dari konflik sosial. Nilai etika politik ini

35 Wawancara dengan Reni Suryani, S.H., M.H (dosen F.H. Unpam), 3 Agustus 2023

36 Wawancara dengan Nur Sa'adah, (dosen), 11 Agustus 2023

37 Wawancara dengan Yani Herlina (guru), 8 September 2023

menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam proses pemilu dan kepemimpinan, serta menghargai keberagaman masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Calon pemimpin yang berorientasi pada kepentingan publik akan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka akan berusaha untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Calon pemimpin diharapkan untuk selalu mengutamakan kepentingan publik dan menghindari tindakan yang bersifat pribadi atau kelompok tertentu. Calon pemimpin yang berorientasi pada kepentingan publik akan menjadi pemimpin yang responsif terhadap masalah dan aspirasi masyarakat. Karena kelak mereka akan mendengarkan suara masyarakat dan berusaha mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama.

Nilai etika politik ini merupakan cerminan dari harapan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan memberikan teladan dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi dalam dunia politik. Dengan menerapkan nilai etika politik ini, calon pemimpin di tahun 2024 dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat serta membawa dampak positif bagi kepemimpinan yang berdaya guna dan berintegritas untuk kemajuan bangsa.

Dalam ranah politik, prinsip-prinsip etika yang baik sangat penting, yakni dengan mengikuti proses politik dengan etika yang sesuai memiliki nilai besar, karena mematuhi norma dan peraturan dalam menjalankan tugas atau mandat akan menghasilkan pencapaian yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan pemerintah, yang diturunkan dari upaya lembaga yang memiliki kewenangan untuk merumuskannya, juga dipengaruhi oleh etika

yang baik. Dengan demikian, setiap aspek kecil dalam praktik politik harus mendapat perhatian, sehingga arahnya adalah mencapai keadilan sebagai wakil manusia yang diberi kewenangan dan tanggung jawab.

Etika juga berperan sebagai panduan moral yang mengarahkan perilaku manusia, dan mencerminkan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan yang diinginkan dan metode untuk mencapainya, antara tindakan moral dan tidak moral, antara perilaku yang pantas dan tidak pantas, antara tindakan yang memberi manfaat dan tidak memberi manfaat, serta antara apa yang diharapkan untuk dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan.³⁸

Etika dan Politik sangat memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut ada berdasarkan pengembangan yang dilakukan Aristoteles tentang Politik yang berkembang berdasarkan pada prinsip Etika. Etika merupakan suatu kebaikan, hal ini dapat dimengerti bahwa setiap tindakan, kegiatan, mengarah kepada tujuan mengejar kebaikan. Dengan demikian kebaikan merupakan apa yang "dituju" dan "dikejar". Hubungan yang nampak antara Etika dan Politik yakni, dalam Nichomachean Ethics, bahwa segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan aktivitas, kegiatan, tindakan seseorang selalu tertuju kepada kebaikan tertentu atau yang disebut dengan Etika. Sedangkan dalam Politics, terdapat dua tesis yakni: tesis pertama yakni bahwa persekutuan aktivitas kehidupan bersama, lahir dan dibangun dengan tujuan menggapai pada tujuan kebaikan tertentu pula, sedangkan tesis kedua Polis yang merupakan persekutuan sebagai puncak utama dalam kehidupan bersama, sehingga tujuan yang pasti yakni untuk mengejar dan mendapatkan kebaikan yang tinggi. Dengan demikian,

38 Yusfriadi Abda, "Komunikasi Politik Ulama Dayah Tridisional Aceh (Studi Ulama Kabupaten Bireuen Dalam Menghadapi Pilkada 2019)," JURNAL AL-FIKRAH Vol 10, no. 1 (2021): 92, <https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.76>.

politik, sebagai sistem dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, harus patuh pada prinsip-prinsip etika, yang mengimplikasikan bahwa etika kebaikan juga merupakan inti dari kesempurnaan etika. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pandangan Aristoteles tentang hubungan antara etika dan politik adalah bahwa etika menjadi dasar dari politik dalam realitas kehidupan.³⁹

Seorang politikus yang baik dan bertanggung jawab dalam setiap lembaga politik harus memprioritaskan pengabdianya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Pengabdian sejati seorang politikus tidak semata-mata didorong oleh motif finansial, keuntungan personal, atau kesenangan, melainkan oleh tekad untuk menjalankan tugasnya di dunia politik dan memenuhi amanat yang diberikan oleh rakyat.⁴⁰ Etika politik memiliki peran penting dalam menganalisis hubungan antara tindakan individu, tindakan kolektif, dan struktur politik yang ada. Fokus pada korelasi ini membantu mencegah reduksi pemahaman etika politik hanya pada aspek etika individu dalam konteks pemerintahan. Tujuan utama dari etika politik adalah memberikan panduan untuk meningkatkan kehidupan politik dengan membangun institusi politik yang adil. Dasar pemikiran ini bersumber dari tradisi pemikiran politik yang menekankan bahwa etika adalah pemikiran kritis dan rasional tentang nilai-nilai dan norma moral yang membentuk perilaku individu dan kolektif dalam kehidupan manusia.⁴¹

Pemimpin yang sukses adalah mereka yang memiliki keahlian dalam mengelola

suasana hati masyarakat, memiliki kemampuan untuk mengubah budaya dan nilai-nilai, serta memanfaatkan berbagai aspek kecerdasan emosional, kesadaran diri, dan empati terhadap masalah sehari-hari. Mereka mampu memahami dan mengatur emosi mereka sendiri, sambil secara intuitif memahami perasaan masyarakat dan aspirasi warga negara.⁴² Tujuan dari etika politik adalah untuk memberikan panduan dalam memperbaiki kehidupan politik dengan harapan membangun institusi politik yang adil. Dasar pemikiran ini didasarkan pada tradisi pemikiran politik yang menekankan bahwa etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional tentang nilai dan norma moral yang membentuk perilaku individu dan kolektif dalam kehidupan, baik pada tingkat pribadi maupun kolektif.⁴³

Dalam bukunya yang berjudul *Tashîl al-Nazhar wa Ta'jil al-Zhafar*, Al-Mawardi menyampaikan harapannya agar para penguasa memberikan perhatian dan kehati-hatian yang lebih dalam menerima nasihat dan masukan dari penasihatnya yang mungkin tidak selalu tulus. Penguasa diharapkan mampu membedakan antara penasihat yang dapat dipercaya dengan penasihat yang hanya memprioritaskan kepentingan pribadi mereka. Pemimpin harus selalu menjaga dirinya dari perilaku yang merugikan dan senantiasa menonjolkan integritas moral dan karakternya. Dengan cara ini, mereka dapat memberikan contoh kepada masyarakat untuk selalu bertindak dengan kehormatan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.⁴⁴

Pemerintahan politik yang sah haruslah

39 Agustinus Wisnu Dewantara, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini* (Kanisius:Yogyakarta, 2017), 53-54.

40 Nur Rohim Yunus, "Etika Dan Moralitas Politik Anggota Dewan," *Mizan Journal of Islamic Law* Vol 2, no. 2 (2014): 258, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.148>.

41 Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Dan Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta:PT Rineka Cipta., 2002), 1.

42 Rd. Sugara Mochamad Haddad and Muhamad Hijran, "Model Kepemimpinan Politik Sunda Dalam Konteks Pendidikan Politik.," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 2017, 336.

43 Dewi Dahlan, "Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)," *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu* Vol 15, no. No 1 (April 2021): 43, <https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>.

44 Al Mawardi, *Tashîl Al-Nazhar Wa Ta'jil al-Zhafar* (Beirut: Dâr al-Nahdhah, 1981), 52.

sejalan dengan prinsip-prinsip alamiah masyarakat sebagai individu yang memiliki kebebasan. Tentang asal kekuasaan tidak ada orang yang dengan sendirinya memerintah, akan tetapi harus dipercayakan oleh rakyat (populus) siapa yang dianggap layak memerintah dan dengan jaminan perjanjian bahwa kekuasaan akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat atau kesejahteraan umum.⁴⁵

Seorang pemimpin perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat yang dapat dipuji dan sifat-sifat yang tidak pantas. Hal ini menjadi esensial karena pemimpin akan mampu mengenali dan melindungi negara dari berbagai ancaman dan tantangan yang ada. Pemimpin juga harus bersedia menjalankan hukum dengan tegas demi melindungi kesatuan dan kesetiaan rakyatnya, bahkan jika tindakan itu dianggap keras. Ini disebabkan oleh keprihatinan yang mendalam atas kesejahteraan rakyatnya, apalagi membiarkan kekacauan yang dapat menyebabkan pertumpahan darah. Menjaga integritas negara dan perdamaian masyarakat harus menjadi prioritas yang lebih tinggi, bahkan jika diperlukan tindakan tegas. Karena kekacauan dalam suatu negara harus segera ditangani, mengingat bahwa kekacauan yang tidak dibereskan akan terus berkembang dan membesar. Oleh karena itu, stabilitas dan keamanan negara harus dijaga dengan sungguh-sungguh.⁴⁶

Menurut Al-Mawardi, terdapat beberapa prinsip umum yang sangat ideal dalam konteks etika politik yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan politik. Prinsip-prinsip ini meliputi kemampuan pribadi pemimpin,

45 Halili Hasan, "Rekrutmen Gubernur Dan Wakil Gubernur D.I Yogyakarta Dalam Perspektif Etika Politik," *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* Vol 1, no. 2 (2004): 187, <https://doi.org/10.21831/civics.v1i2.5715>.

46 Nashar Akbar Muhammad and R. Yuli Akhmad Hambali, "Kejujuran Dan Etika Dalam Konsep Politik Machiavelli," *Jurnal Perspektif* Vol 5, no. 1 (2021): 69, <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.115>.

kejujuran, keadilan, pemenuhan amanat sesuai haknya, penghargaan terhadap pengetahuan, serta pemberian prioritas kepada kepentingan rakyat, khususnya yang tertindas, di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Pemerintahan yang mengabaikan prinsip-prinsip etika politik ini memiliki risiko mengalami kehancuran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aktivitas politik, budaya politik yang lebih bermartabat dapat terbentuk, dan manfaatnya akan langsung dirasakan oleh rakyat.⁴⁷

Hambatan dan Tantangan

Dalam proses pemilihan umum tahun 2024, calon pemimpin dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan yang dapat menguji kualitas dan konsistensi etika politik mereka. Menurut Bahtiar Effendy, demokrasi bukan hanya terkait dengan struktur formal semata, tetapi juga memiliki dimensi budaya. Salah satu aspek budaya demokrasi ini berhubungan dengan sikap terhadap kemenangan dan kekalahan dalam pemilihan umum. Aspek ini memiliki relevansi penting dalam upaya memajukan demokrasi.⁴⁸ Meskipun tuntutan dan tekanan yang ada, penting bagi calon pemimpin untuk memahami bahwa menjalankan etika politik yang kuat adalah esensi dari kepemimpinan yang berkualitas.

Hambatan yang diprediksi oleh calon pemimpin negeri dalam menjalankan etika politik dalam proses pemilihan umum tahun 2024 dapat mempengaruhi pelaksanaan nilai nilai etika politik yang di junjung tinggi, hambatan tersebut antara lain:

1) Polarisasi Politik: polarisasi adalah perbedaan yang jelas antara dua kelompok politik. Ini juga pada dasarnya mencerminkan preferensi politik yang mapan dan

47 Diana, Masruri, and Surwandono, "Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi," 382.

48 Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 227.

keberpihakan yang jelas dalam masyarakat.⁴⁹ Polarisasi Politik bisa menjadi salah satu hambatan utama karena dapat mengarah pada retorika yang keras, perpecahan, dan ketidakmampuan untuk bekerja sama lintas partai. Hal ini dapat menghambat usaha calon pemimpin untuk menjalankan etika politik yang inklusif dan kolaboratif.

2) Pengaruh Uang dalam Politik: Pengaruh uang dalam politik menjadi hambatan yang serius bagi calon pemimpin dalam menjalankan etika politik dalam proses pemilu 2024 karena dapat mengancam integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi. Praktik uang dalam politik dapat mengganggu etika politik yang berfokus pada kepentingan publik. Calon pemimpin akan dihadapkan pada tekanan dari pihak-pihak yang memberikan dukungan finansial, sehingga sulit untuk menjaga kemandirian dan integritas dalam pengambilan keputusan. Praktik korupsi dalam politik, termasuk penggunaan uang untuk memengaruhi keputusan politik, bukanlah permasalahan sepele, melainkan sebuah permasalahan serius dengan dampak yang merugikan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta dukungan kuat dari masyarakat, untuk bekerja sama dalam upaya mengatasi masalah ini.⁵⁰

3) Persepsi Masyarakat: Tantangan lain adalah persepsi masyarakat yang mungkin tidak selalu akurat atau adil terhadap calon pemimpin. Fitnah, beritapalsu, dan penyebaran informasi yang salah dapat mempengaruhi citra calon pemimpin, menghambat upaya mereka untuk menjalankan etika politik

dengan baik. Peran media memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kondisi dan keyakinan individu. Media, dengan segala keunggulannya, mampu menyampaikan beragam pesan, informasi, dan pengetahuan yang pada akhirnya dapat membentuk pandangan dan keyakinan individu. Hal ini kemudian dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu.⁵¹

4) Ketidaksetaraan Akses Media: Ketidaksetaraan akses media, berita palsu atau hoaks dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin. Penyebaran berita palsu, manipulasi informasi, dan polarisasi opini adalah masalah yang sering muncul. Media sosial seringkali menjadi sumber informasi yang tidak diverifikasi dengan baik, dan akibatnya, dapat memengaruhi persepsi masyarakat dengan data yang tidak benar.⁵² Ini dapat menghambat upaya calon pemimpin untuk menjalankan etika politik yang berfokus pada kebenaran dan integritas. Ketidaksetaraan akses terhadap media dan platform komunikasi dapat membatasi kemampuan calon pemimpin untuk menyampaikan pesan mereka dengan adil dan merata kepada seluruh masyarakat.

5) Tekanan Kelompok dan Keinginan Pendukung: Calon pemimpin dimungkinkan dihadapkan pada tekanan dari kelompok-kelompok tertentu atau keinginan dari pendukung mereka yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka, bahkan jika tidak selalu sesuai dengan etika politik yang dijunjung. Kelompok-kelompok kepentingan sering menjadi penentu dalam menentukan

49 Wasisto Raharjo Jati, "Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol 26, no. 2 (2022): 153, <https://doi.org/10.22146/jsp.66057>.

50 Hening Satitis and Agustinus Wisnu Dewantara, "Kasus Suap Uang Jelang Pemilu Dalam Politik Dilihat Dari Etika Menurut Machiaveli," *OSF PREPRINTS*, 2019, 6, <https://doi.org/10.31227/osf.io/u85eq>.

51 Fajar Yusuf Abadi, Rohmad Wido, and Rose Fitria Lutfiana, "Persepsi Masyarakat Dalam Menanggapi Iklan Politik Di Televisi," *Jurnal PEKAN Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 6, no. 1 (2021): 70, <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1168>.

52 Vivi Friskila Angela, "Analisis Peran Media Sosial Dalam Pengaruh Politik Menjelang Pemilu," *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 10, no. 01 (2023): 556, <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i1.9604>.

agenda, menggerakkan isu-isu, menyebarkan gagasan, menggagas kebijakan, dan mendesak pemerintah. Meskipun tujuan utama mereka adalah mewakili kepentingan anggota kelompok, yang sebagian besar terbatas pada kepentingan publik, terkadang di antara anggota kelompok kepentingan juga memiliki aspirasi pribadi yang lebih sempit.⁵³

6) Regulasi dan Hukum yang Lemah: Kondisi hukum dan regulasi yang lemah atau tidak tegas terkait dengan etika politik dalam kampanye dan pemilu dapat memberi ruang bagi pelanggaran dan praktik tidak etis. Kampanye politik dapat dijelaskan sebagai suatu usaha yang terstruktur dengan maksud memengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok tertentu. Dengan tujuan meraih kemenangan dalam pemilihan tertentu, setiap kandidat harus mempertimbangkan strategi dan perencanaan yang cermat.⁵⁴

7) Tuntutan Waktu dan Efektivitas: Tuntutan waktu yang tinggi dapat membuat calon pemimpin kesulitan untuk berinteraksi secara mendalam dengan masyarakat, menjelaskan visi mereka, dan mendengarkan masukan. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan etika politik yang melibatkan partisipasi publik.

8) Isu Teknologi dan Keamanan Data: Kemajuan teknologi telah memungkinkan penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak akurat dengan cepat melalui media sosial dan platform online lainnya. Calon pemimpin dapat dihadapkan pada risiko manipulasi informasi yang dapat merusak etika politik yang berfokus pada kebenaran dan transparansi. Tantangan terkait privasi

dan keamanan data dalam era digital dapat memengaruhi bagaimana calon pemimpin berkomunikasi dengan masyarakat dan mengelola informasi.

Semua hambatan dan tantangan ini memerlukan upaya dan komitmen yang kuat dari calon pemimpin untuk tetap teguh menjalankan etika politik, meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan dan kendala. Upaya untuk mengatasi hambatan ini akan membantu membangun kepemimpinan yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan publik di tengah dinamika proses pemilu yang sering kali kompleks dan kompetitif.

Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui kesadaran, komitmen, dan tindakan konkret yang mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam setiap tahap kampanye dan pemilu. Dalam menghadapi hambatan dan tantangan tersebut, calon pemimpin yang mampu mempertahankan integritas dan etika politik yang kuat akan membangun fondasi yang kokoh untuk kepemimpinan yang berkelanjutan dan bermakna. Memahami pentingnya etika politik dan menjalankannya dengan konsisten akan memberikan kontribusi positif bagi perjalanan demokrasi dan kemajuan negara.

Kesimpulan

Etika politik yang kuat dan konsisten dapat menjadi pembeda utama di tengah kompetisi sengit dan tantangan yang dihadapi oleh calon pemimpin. Oleh karena itu, menjalankan etika politik yang berkualitas dan mempertahankannya selama proses kampanye dan kepemimpinan sangatlah penting untuk memenangkan dukungan dan membangun fondasi kepemimpinan yang bermartabat. Nilai etika politik yang diharapkan oleh masyarakat dari calon pemimpin di tahun 2024 mencakup integritas, transparansi, kesetaraan, keterlibatan, kemampuan

53 Mohammad Maiwan, "Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik," *Jurnal Mimbar Demokrasi* Vol 15, no. 2 (2016): 77, <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i2.8815>.

54 Siti Fatimah, "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* Vol 1, no. 1 (2018): 5, <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>.

komunikasi, sikap terhadap diversitas, dan komitmen pada kepentingan publik. Dalam menjalankan etika politik, calon pemimpin di tahun 2024 diharapkan memiliki komitmen dan kesadaran yang kuat terhadap nilai-nilai tersebut. Pemimpin yang menjunjung tinggi etika politik ini akan mampu memberikan arahan yang kokoh dan memimpin negara dengan integritas, transparansi, dan kesetaraan, menghasilkan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif, walaupun banyak calon pemimpin berusaha memperlihatkan etika politik yang baik, tetap saja masyarakat akan menyaring dan mengkritisi setiap tindakan dan pernyataan yang dinilai kontroversial atau tidak etis. Pengaruh dari lingkungan sosial dan nilai-nilai budaya juga ikut membentuk persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin.

Etika politik yang baik adalah hal yang tidak hanya diharapkan oleh masyarakat, tetapi juga merupakan syarat penting dalam membentuk kepemimpinan yang bermartabat dan berkeadilan. Etika politik calon pemimpin di tahun 2024 akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan kemampuan calon pemimpin untuk memimpin negara dengan baik. Memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam praktik politik akan membantu calon pemimpin membangun dukungan yang kuat dari masyarakat dan menciptakan kepemimpinan yang bermartabat serta berdampak positif. Dalam menghadapi hambatan dan tantangan ini, calon pemimpin perlu memiliki keteguhan moral, komitmen pada nilai-nilai etika politik, dan kemauan untuk beradaptasi dengan dinamika politik yang terus berubah. Upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan ini akan membantu membangun kepemimpinan yang bermartabat, integritas, dan berdampak positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Fajar Yusuf, Rohmad Wido, and Rose Fitriana Lutfiana. "Persepsi Masyarakat Dalam Menanggapi Iklan Politik Di Televisi." *Jurnal PEKAN Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 6, no. 1 (2021): 67-78. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1168>.
- Abda, Yusfriadi. "Komunikasi Politik Ulama Dayah Tridisional Aceh (Studi Ulama Kabupaten Bireuen Dalam Menghadapi Pilkada 2019)." *JURNAL AL-FIKRAH* Vol 10, no. 1 (2021): 78-100. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.76>.
- Angela, Vivi Friskila. "Analisis Peran Media Sosial Dalam Pengaruh Politik Menjelang Pemilu." *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 10, no. 01 (2023): 555-64. <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i1.9604>.
- Anzaikhan, M, and Fitri Idani. "Kepemimpinan Ideal Umar Bin Abdul Aziz Dan Relevansinya Terhadap Konsep Pemerintahan Modern (Studi Analisis Pemikiran Fahrudin Faiz)." *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* Vol IX, no. II (2022): 125-39. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4878>.
- Bashori, Ahmad, and Zainun Kamaluddin Fakhri. "Etika Politik Perspektif Bahtiar Effendy." *Paradigma Jurnal Kalam Dan Filsafat* Vol 3, no. 02 (2021). <https://doi.org/10.15408/paradigma.v3i02.30898>.
- Bernard, Bass, M. *Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications*. 3rd ed. New York: The Free Press, 2008.
- Dahlan, Dewi. "Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)." *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu*

- Vol 15, no. No 1 (April 2021): 42. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>.
- Darsono, Darsono, and Clara Aprillia. "Patologi Pembangunan Etika Politik Pascareformasi Dalam Perspektif Poststrukturalis-Hipersemiotik." *Journal of Urban Sociologi* Vol 3, no. 1 (2020): 67-82. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i1.1193>.
- Dewantara, Agustinus Wisnu. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Kanisius:Yogyakarta, 2017.
- Diana, Rashda, Siswanto Masruri, and Surwandono Surwandono. "Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi." *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol 14, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433>.
- Dwinugraha, Akbar Pandu. "Kepemimpinan Politik Kepala Desa." *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol 5, no. 2 (2020): 117-25. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v5i2.4834>.
- Effendy, Bahtiar. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- F. Isjwara, F. Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Cet 9. Bandung : Putra Bardin, 1999.
- Fatimah, Siti. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu." *Resolusi:Jurnal Sosial Politik* Vol 1, no. 1 (2018): 5-16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>.
- Haddad, Rd. Sugara Mochamad, and Muhamad Hijran. "Model Kepemimpinan Politik Sunda Dalam Konteks Pendidikan Politik." *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 2017, 326-37.
- Haryatmoko, Haryatmoko. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. 3rd ed. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2014.
- Hasan, Halili. "Rekrutmen Gubernur Dan Wakil Gubernur D.I Yogyakarta Dalam Perspektif Etika Politik." *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* Vol 1, no. 2 (2004): 181-90. <https://doi.org/10.21831/civics.v1i2.5715>.
- In'amuzzahidin, Muh. "Etika Politik Dalam Islam." *Jurnal Wahana Akademika* Vol 2, no. 2 (2015): 42. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382> PDF.
- Irawan, Prasetya. *Logika Dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori Dan Panduan Praktik Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula*. STIA-LAN Press : Jakarta, 2000.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol 26, no. 2 (2022): 152-67. <https://doi.org/10.22146/jsp.66057>.
- Juanita, Fransiska Irma. "Hubungan Etika Politik Dan Relevansinya Bagi Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Indonesia." *OSFPREPRINTS*, June 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/u4nfp>.
- Lord, Robert G, and Karen J Maher. *Leadership and Information Processing Linking Perceptions and Performance*. Unwin-Hyman, Boston, 1993.
- Maiwan, Mohammad. "Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik." *Jurnal Mimbar Demokrasi* Vol 15, no. 2 (2016): 75-91. <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i2.8815>.
- Mawardi, Al. Tashil Al-Nazhar Wa Ta'jil al-Zhafar. Beirut: Dâr al-Nahdhah, 1981.
- Mintzberg, Henry. "Leadership and Management Development: An Afterword." *The Academy of Management*

- Executive Vol 18, no. 3 (2004): 140. <https://doi.org/10.5465/AME.2004.14776190>.
- Muhammad, Nashar Akbar, and R. Yuli Akhmad Hambali. "Kejujuran Dan Etika Dalam Konsep Politik Machiavelli." *Jurnal Perspektif* Vol 5, no. 1 (2021): 57-73. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.115>.
- Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. *Pancasila Sebagai Etika Politik*. Jakarta: Kompas, 2013.
- Ramdhani, Lany Erinda. "Fenomena Kepemimpinan Fenomenal." *Jurnal Borneo Administrator* Vol 11, no. 3 (2015): 268-96. <https://doi.org/10.24258/jba.v11i3.203>.
- Salam, Burhanuddin. *Etika Sosial Dan Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta., 2002.
- Satitis, Hening, and Agustinus Wisnu Dewantara. "Kasus Suap Uang Jelang Pemilu Dalam Politik Dilihat Dari Etika Menurut Machiaveli." *OSF PREPRINTS*, 2019. <https://doi.org/10.31227/osf.io/u85eq>.
- Setiawan, Anang, and Erinda Alfiani Fauzi. "Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan* Vol 1, no. 1 (2019): 1-12. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7614>.
- Siagian, Sondang P. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. Cet 4. Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo, 2010.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Cet Ke-17. Yogyakarta : kanasius, 2005.
- . *Etika Politik :Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. VII. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Yunus, Nur Rohim. "Etika Dan Moralitas Politik Anggota Dewan." *Mizan Journal of Islamic Law* Vol 2, no. 2 (2014): 255-74. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.148>.
- Zein, Fuad Muhammad. "Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Al Mawardi)" Vol 1, no. 2 (2016): 489-507. <https://doi.org/10.25217/jm.v1i2.52>.